

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG: STUDI KASUS PERAN ALIANSI
NASIONAL REFORMASI KUHP DALAM PENYUSUNAN
DAN PEMBAHASAN PASAL HUKUMAN MATI DALAM RUU
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial



FAHLEVI

1121004010

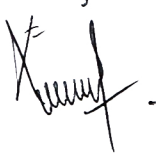
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya Saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Saya sertakan dengan benar.

Nama : Fahlevi

NIM : 1121004010

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Mei 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Fahlevi
NIM : 1121004010
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi Kasus Peran Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam Penyusunan dan Pembahasan Pasal Hukuman Mati dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bani Pamungkas, SH., MSi., MPA
Penguji I : Profesor Rusadi Kantaprawira
Penguji II : Insan Harapan Harahap S.Sos., MAP

()

()

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Mei 2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, hanya atas berkah, Rahmah dan seizin Allah, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana (S1) di Universitas Bakrie. Di penghujung proses studi yang ditandai dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas rahmah, berkah, kemudahan, ridha dan yang terpenting atas izinNya. BarakAllah.
2. Orang Tua dan Keluarga atas segala dukungan yang tanpa jeda diberikan dalam bentuk doa, moral, dan dukungan baik materil dan non-materil. Tanpa peranan mereka, penulis tidak akan sampai kepada tahap kehidupan saat ini.
3. Bapak Bani Pamungkas, SH., MSi., MPA atas waktu bimbingan, saran, dan masukan lainnya yang sangat membantu penulisan skripsi ini, terlebih beliau sangat sabar dalam membimbing saya dalam mengerjakan Skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik, dan Bapak Muhammad Badaruddin S.Sos, M.Sc, M.A selaku Pembimbing Akademik, serta seluruh dosen prodi Ilmu Politik Universitas Bakrie, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, selama penulis menempuh gelar sarjana.
5. Alm. Supriyadi Eddyono Widodo selaku mantan Direktur Eksekutif ICJR, beliau sudah banyak membantu penulis dan membimbing penulis melakukan penulisan skripsi ini. Beliau juga sangat membantu penulis dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan. Serta beliau sudah menjadi teman penulis dalam berdiskusi dan beliau juga sangat banyak membantu penulis melalui karya tulisan maupun pemikiran beliau yang dituangkan langsung agar menjadi bahan dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Erasmus A. T Napitupulu S.H selaku Direktur Pelaksana ICJR, Adhigama A. Budiman, Ajeng Gandini Kamila S.H, Maidina Rahmawati S.H, Sustira Dirga yang merupakan *Researcher Associate* ICJR, Anggara S.H (Pjs Direktur Eksekutif), Wahyu Wagiman (Sekertaris badan pengurus ICJR), Katrina Wea Toja, Lutfi Adrian Putra, Dessy Permatasari Sarengat, dan Tobias Bata Pela

yang telah banyak membantu, selama penulis melakukan penelitian terlibat di ICJR yang merupakan anggota inti Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

7. Lukman Hamdun S.H sebagai Advokat, saudara, dan kawan diskusi yang selalu mendukung penulis, dalam memberikan saran maupun kritik terhadap tulisan penulis. Serta beliau selalu bijaksana dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan S1.
8. Fikri Sena Rafi S.IKom dan Shahnaz Fasya S.E sebagai sahabat sekaligus saudara yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama persahabatan 19 tahun ini.
9. KMPA Wicaktala yang sudah menjadi motivasi dan semangat bagi penulis dalam berkuliah serta menyelesaikan Tugas akhir ini.
10. Suciliani, Nurfauziah, Nana Suryana, Sheila Fitriani dan Adiputra Zulham telah banyak memberikan penulis dukungan, semangat, dan selalu ada ketika penulis membutuhkan teman berdiskusi.
11. Manda Illahi, Rachma Alia, Oktavia, Bella, Anissa dan Noor Zalina, yang selama ini sudah terus mendukung dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Allya, Zhanu Setyo Aji, Eka Putra, Rizky Ananda, Hanifah, Ahmad Irsyad, Mulky, Adinda Lovalina, Raditya Nalaputra, Imam Sopani, Dessy Fadilah, Rizka, Rizky, Fauzan Adhim dan Asrama UKM. Serta kepada seluruh keluarga besar Ilmu Politik Universitas Bakrie dan segenap teman-teman Universitas Bakrie lainnya, atas dukungan yang luar biasa selama perkuliahan di Universitas Bakrie.

Akhir kata, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas berbagai dukungan, bantuan dan doa yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bermanfaat untuk menambah kajian-kajian lainnya terkait yang akan dilakukan, serta skripsi ini akan menjadi bahan rujukan untuk pemerintah dapat merumuskan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan mengutamakan dasar keadilan.

Jakarta, April 2018

Fahlevi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahlevi
NIM : 1121004010
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi Kasus Peran Aliansi Nasional Reformasi KUHP Dalam Penyusunan dan Pembahasan Pasal Hukuman Mati Dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 2018

Yang menyatakan,



Fahlevi

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG: STUDI KASUS PERAN ALIANSI NASIONAL REFORMASI
KUHP DALAM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PASAL HUKUMAN
MATI DALAM RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

FAHLEVI

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus terhadap dinamika penyusunan dan pembahasan RUU KUHP di DPR pada periode 2014-2019 dan juga untuk melihat partisipasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam proses penyusunan dan pembahasan pasal hukuman mati dalam RUU KUHP. Penulis juga mengidentifikasi seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang. Partisipasi masyarakat ini salah satunya dapat dilihat dari peran Aliansi sebagai koalisi dan perwakilan masyarakat, yang membantu memberikan pendapat dan rekomendasi dalam proses penyusunan dan pembahasan pasal hukuman mati dalam RUU KUHP. Adapun penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dan observasi, dengan sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen kebijakan, laporan sidang Panitia Kerja DPR, dokumen advokasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan berbagai dokumen kunci yang dapat memperkuat tulisan ini. Lebih lanjut, tujuan penelitian ini untuk melihat permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan dan pembahasan masuknya pasal hukuman mati dalam RKUHP, serta perdebatan pro dan kontra didalamnya. Lebih jauh, penulis memiliki temuan terkait perbedaan perspektif antara pemerintah dan Koalisi masyarakat sipil terkait hukuman mati, serta adanya keterlibatan Organisasi Internasional secara tidak langsung dalam pembahasan RUU KUHP.

Kata Kunci: Ilmu Politik, Ilmu Kebijakan, Kebijakan Publik, Masyarakat, LSM, Koalisi LSM, Hukuman Mati, Lembaga Donor.

Community Participation in the Establishment of Laws: A Case Study of the Role of the National Alliance of Criminal Code Reform in the Preparation and Discussion of Articles of Death Penalty in the Bill of the Criminal Code

Fahlevi

ABSTRACT

This study focuses on the dynamics of the drafting and discussion of the Criminal Code Bill in the period 2014-2019 and also to see the participation of the National Alliance of Reform of the Criminal Code in the process of drafting and discussing the article of the death penalty in the Criminal Code Draft. The author also identifies how much public participation in the formation of the Act. This community participation is one of them can be seen from the role of the Alliance as a coalition and representatives of the community, which helps provide opinions and recommendations in the process of drafting and discussing the article of capital punishment in the RUU KUHP. The research uses descriptive-qualitative and observation methods, with data sources obtained through policy documents, reports of DPR Working Committee meetings, advocacy documents of the National Alliance for Reform of the Criminal Code and various key documents that can strengthen this paper. Furthermore, the purpose of this study is to see the problems that occur in the process of formulating and discussing the entry of the death penalty article in the RKUHP, as well as the debate of the pros and cons inside. Furthermore, the authors have findings regarding the differences of perspectives between government and civil society Coalition on the death penalty. as well as the involvement of International Organizations indirectly in the discussion of the Criminal Code Bill.

Keywords: Political Science, Policy Science, Public Policy, Society, NGO, NGO Coalition, Death Penalty, Funding Agency.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
GLOSARIUM	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.5 Manfaat Penulisan	7
1.5.1 Akademis	7
1.5.2 Praktis	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kajian Teori.....	10
2.1.1. Ilmu Kebijakan.....	10
2.1.2. Proses Kebijakan.....	14
2.1.3. Pembentukan Undang-Undang	17
2.1.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik	21
2.1.5. Pembentukan Jaringan LSM Dalam Perspektif <i>Transnational Advocacy Network</i>	25
2.1.6. Koalisi LSM.....	30
2.1.6 Hukuman Mati	32
2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	39

2.3. Operasionalisasi Konsep	41
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Kerangka Pemikiran	42
3.2 Metode Penelitian.....	43
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Teknik Analisa Data.....	47
3.5 Pengujian Keabsahan Data.....	47
BAB IV	50
PEMBAHASAN	50
4.1. Pembentukan Aliansi Nasional Reformasi KUHP	50
4.1.1. Sejarah dan Motif Pendirian Aliansi Nasional Reformasi KUHP ..	50
4.1.2. Dukungan Finansial bagi Anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP.....	53
4.1.3. Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Hubungannya dengan Masyarakat	55
4.2. Perkembangan Perdebatan terkait Pidana Mati dalam KUHP	57
4.2.1. Perkembangan Pidana Mati dari Masa Hindia Belanda hingga Reformasi	57
4.2.2. Pro-Kontra Keberadaan Pasal Pidana Mati: Mengapa menjadi Perdebatan?	61
4.3. Penyusunan dan Pembahasan Pasal Pidana Mati dalam RUU KUHP 2015.....	69
4.3.1. Perkembangan Proses Penyusunan dan Pembahasan RUU KUHP	69
4.3.2. Dinamika Pembahasan Pasal Pidana Mati	81
4.4. Partisipasi dan Aktivitas Aliansi Nasional Reformasi KUHP Terkait Advokasi Hukuman Mati	93
4.5. Analisis Terhadap Partisipasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam Penyusunan dan Pembahasan Pasal Pidana Mati dalam RUU KUHP 2015 ...	114
4.5.1 Analisis tentang Motif Partisipasi Aliansi: Kepentingan Publik dan Lembaga Donor	114
4.5.2 Analisis tentang Perbedaan Perspektif dalam Melihat Pasal Pidana Mati.....	116
BAB V	121
PENUTUP.....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel I Operasionalisasi Konsep	44
Tabel II. Data yang diperlukan dan Metode Pengumpulan Data	45
Tabel III. Informan.....	46
Tabel IV. Daftar Pertanyaan Penelitian, Teori dan Metologi Penelitian yang Digunakan.....	47
Tabel V. Hubungan antara Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Masyarakat.....	57
Tabel VI. Perbedaan Konsep Pidana Mati dalam KUHP dan RKHUP 2015	82
Tabel VII. Pasal Pidana Mati dalam Buku II RKUHP 2015	84
Tabel VIII. Beberapa Pasal yang Dianggap akan Dilanggar apabila Pidana Mati masih tercantum dalam KUHP	84
Tabel IX. DIM Fraksi Terkait Hukuman Mati.....	91
Tabel X. Kegiatan Advokasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP 2006-2007.....	99
Tabel XI. Kegiatan Advokasi ICJR 2015-2016Kegiatan Advokasi ICJR 2015-2016.....	101
Tabel XII. Pemantauan Pembahasan RUU KUHP	109
Tabel XIII. Kegiatan Advokasi ICJR terkait Pidana Mati.....	110
Tabel XIV.Diskursus Perdebatan Pasal Pidana Mati dalam Berbagai Diskusi Publik yang diadakan oleh ICJR pada tahun 2017	113

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Hubungan Sistem Pemerintahan dan Kebijakan	12
Diagram 2 Political System (Policy Process) by David Easton	14
Diagram 3. Dinamika Kebijakan Publik	15
Diagram IV. Kerangka Pemikiran	42
Diagram V. Pemetaan Fokus Advokasi Anggota Aliansi Nasional Reformasi Birokrasi	52
Diagram VI. Alur Sumber Pendanaan ICJR (Data diolah).....	55
Diagram VII. Pendapat Publik terkait Pidana Mati bagi Pengedar Narkoba (Survei 2015).....	63
Diagram VIII. Pendapat Publik terkait Pidana Mati bagi Pengedar Narkoba (Survei 2015).....	64
Diagram IX. Pendapat Penolak Pidana Mati bagi Pengedar Narkoba (Survei 2015)	64
Diagram X, Pendapat Publik terkait Pidana Mati selain bagi Pengedar Narkoba (Survei 2015).....	65
Diagram XI. Pendapat Publik terkait Pidana Mati bagi Kejahatan Terorisme (Survei 2017).....	65
Diagram XII. Pendapat Publik terkait Pidana Mati bagi Kejahatan Terorisme (Survei 2017)	66
Diagram XIII. Proses Perancangan, Penyusunan dan Pembahasan RKUHP	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Wawancara dengan Komisi III DPR RI	138
---	------------